

**ANALISIS POTENSI DAN  
PENGEMBANGAN WILAYAH  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**HOIRUN NISA  
NIM. 12020110110008**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**2014**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Hoirun Nisa  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110110008  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Ilmu Ekonomi Studi  
Pembangunan  
Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI DAN PENGEMBANGAN  
WILAYAH KABUPATEN LEBAK  
PROVINSI BANTEN  
Dosen Pembimbing : Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M. Si

Semarang, Juni 2014

Dosen Pembimbing,

(Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si)

NIP. 197508212002122001

## **PENGESAHAN KELULUSAN**

Nama Penyusun : Hoirun Nisa  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110110008  
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis /IESP  
Judul Skripsi : Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah  
Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telah dinyatakan lulus pada tanggal: 24 Juni 2014

Tim Penguji :

1. Hastarini Dwi Atmanti, S.E, M.Si (.....)
2. Drs. Mulyo Hendarto, MSP (.....)
3. Alfa Farah S.E, M.Sc (.....)

Semarang, Juni 2014

Pembantu Dekan I,

(Anis Chariri, S.E, M.Com, Ph.D, Akt)

NIP. 19670809 199203 1001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya Hoirun Nisa menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Juni 2014

Yang membuat pernyataan,

(Hoiron Nisa)

NIM. 12020110110008

## ABSTRACT

*Lebak regency is one of regencies in Banten province. It has a lot of potential. The potential of such close to the capital city of Jakarta and superior in food products. However, it is one of Lebak regency left behind so that the necessary efforts to develop the region through the determination of the base sector, other sectors that have the potential to be developed as well as the interaction between Lebak regency in Banten Province.*

*The purpose of this study is to identify the sector base in Lebak Regency by using a Location Quotient (LQ) then identify potential sectors that have competitive advantage and specialization by using shift share analysis tools and models Growth Ratio (MRP) and then these analysis tools are combined and form overlay analysis. The last purpose is identifying the interaction between Lebak Regency with the other regions in Banten Province. It is using the gravity method.*

*Based on LQ analysis, we know that Lebak regency has 6 basic sectors, such as agriculture, mining and excavating, building and constructing, trading, hotel and restaurant, finance and leasing. Besides, there are 3 non basic sectors, electricity, gas, and clean water. From Shift Share, MRP, and Overlay analysis, there are 9 sectors that have excellent competitiveness and others have only special characteristic. Sectors which have excellent competitiveness are mining and excavating, building and construction, trading, hotel and restaurant, and also financing, leasing and other services. These sectors are potential to be developed. Other sectors that have potential to be developed are expedition and communication. The result of gravitation method is about strong interaction between Lebak regency with Tangerang, Serang, and Pandegalang Regency, and also Tangerang, South Tangerang, Serang City. Besides, weak interaction is happened with Cilegon City.*

*Keys :Developing Region, Region Potential, LQ, Shift Share, MRP, Overlay, Gravitation Method.*

## ABSTRAK

Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten. Kabupaten ini memiliki banyak potensi. Potensi tersebut diantaranya jarak yang dekat dengan ibu kota Jakarta dan unggul dalam produk bahan pangan. Namun, ternyata Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten tertinggal sehingga diperlukan upaya pengembangan wilayah melalui penentuan sektor basis, sektor lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan serta interaksi antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Banten.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi sektor basis yang ada di Kabupaten Lebak dengan menggunakan alat analisis *Location Quotient* (LQ) kemudian mengidentifikasi sektor potensial yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi dengan menggunakan alat analisis *Shift Share* dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) kemudian kedua alat analisis tersebut digabungkan dan membentuk analisis *Overlay*. Tujuan yang terakhir yaitu mengidentifikasi interaksi antar daerah dengan menggunakan metode gravitasi.

Berdasarkan hasil analisis LQ diketahui bahwa sektor basis di Kabupaten Lebak adalah terdiri dari 6 sektor diantaranya sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang bukan merupakan sektor basis sebanyak 3 sektor yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Hasil analisis *Shift Share* dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) kemudian hasil keduanya digabungkan lalu dianalisis dengan menggunakan analisis *Overlay* diketahui bahwa sembilan sektor yang ada di Kabupaten Lebak seluruhnya memiliki keunggulan kompetitif namun hanya terdapat beberapa sektor yang memiliki kemampuan spesialisasi. Sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi diantaranya yaitu sektor pertambangan dan penggalian, bangunan atau konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Keempat sektor tersebut merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sedangkan sektor yang sebenarnya dapat dipicu untuk menjadi sektor yang dominan atau mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi. Hasil analisis metode gravitasi yaitu rata-rata interaksi yang paling kuat dengan Kabupaten Tangerang kemudian Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang serta interaksi terlemah yaitu dengan Kota Cilegon

Kata Kunci: Pengembangan Wilayah, Potensi Wilayah, *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), *Overlay*, Metode Gravitasi

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan anugerah kepada penulis. Tiada daya selain karena Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penelitian ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Prof. Drs. Mohamad Nasir, M. Si., Akt., Ph. D
2. Ibu Hastarini Dwi Atmanti, S.E., M. Si selaku dosen pembimbing atas segala kesabaran, arahan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Pak Darwanto S.E., M. Si selaku dosen wali atas segala arahannya selama menempuh pendidikan di kampus FEB Undip.
4. Seluruh Dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pemahaman selama masa studi.

5. Kedua orang tua, mama (Hikah Atikatul) dan Papa (Ragil Susanto, Alm), yang telah berjuang untuk mendidik dan menyayangi penulis sepanjang hayat.
6. Holid Darussalam (Aa), Rasyid Apridha (Abang), Siti Hasanah (Teteh), Juniar Haryani (Adik) dan Mira Wisda Handayani (Adik), Kak Rio, Kak Saroh, Raras yang selalu memberikan masukan, nasehat dan semangat kepada penulis.
7. Agny Gallus Pratama, yang telah menjadi sahabat dekat, kakak, partner bisnis dan teman diskusi. Terimakasih atas kasih sayang dan motivasi selama ini.
8. Citireng (Nanik, Vika, Eta), terimakasih telah menjadi sahabat bisnis. Terimakasih atas pelajaran Bisnis selama ini.
9. Martha, Iga, Tami, Danu, Bram, Ari, Sandy, Hendy, Kunto, Nalar, Irul, Rosi, Rahmi, Sinaga, Kinti, Anna, Intan, Desi, Bang Risky, Ian, Astri, Dian, Pipit, Kiki, Agil serta delapan puluh teman-teman IESP lainnya. Terimakasih atas persahabatan selama ini. Masa capek, senang, kucel, bau kita lewati bersama. Selain itu, Mba Dien, Mba Retno, Mba Rei, Mba Lilis, Mba Linda, Mba Heni, Mba Tyas, Mba Ayu, Yufi, Pak Ihsan, Mas Agung, Mas Yoko, Mas Yoga, Pak Hans, Mas Fajar atas persahabatan selama ini.

Semarang, Juni 2014

Penulis



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16

1.5 Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>18</b>
2.1 Landasan Teori .....	18
2.1.1 Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.1.2 Pembangunan Ekonomi Daerah.....	22
2.1.2.1 Teori Basis Ekonomi .....	24
2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Jalur Cepat .....	26
2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Interregional.....	27
2.1.3 Pengembangan Wilayah .....	29
2.1.4 Sektor Potensial dalam Pengembangan Wilayah.....	31
2.1.5 Model Gravitasi .....	32
2.1.6 Penelitian Terdahulu .....	36
2.1.7 Kerangka Pemikiran .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
3.1 Variabel Penelitian.....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	47
3.2.1 Jenis Data .....	48

3.2.2 Sumber Data .....	48
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	48
3.4 Metode Analisis .....	48
3.4.1 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	49
3.4.2 Analisis <i>Shift Share</i> (SS) .....	51
3.4.3 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) .....	54
3.4.4 Analisis <i>Overlay</i> .....	57
3.4.5 Model Gravitasi.....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	61
4.1.2 Demografi .....	62
4.1.3 Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Sektoral.....	62
4.1.4Tata Pemanfaatan Lahan .....	68
4.1.5 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak.....	70
4.1.6 wKondisi Perekonomian.....	73
4.2 Analisis Data .....	77

4.2.1 Hasil Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	77
4.2.2 Hasil Analisis <i>Shift Share</i> (SS).....	85
4.2.3 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).....	89
4.2.4 Hasil Analisis <i>Overlay</i> .....	95
4.2.5 Analisis Gravitasi .....	99
BAB V PENUTUP .....	103
5.1 Kesimpulan .....	103
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	106
5.3 Saran .....	106
DAFTAR PUSTAKA .....	109
LAMPIRAN .....	113

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/ kota di Provinsi Banten Tahun 2002-2012 .....	5
Tabel 1.2 Perkembangan PDRB Perkapita ADHK 2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten/kota di Provinsi Banten .....	6
Tabel 1.3 Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2000-2012 (Dalam Persentase) .....	8
Tabel 1.4 Output Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Lebak Tahun 2000-2012 (Dalam juta rupiah).....	10
Tabel 1.5 Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kabupaten/ kota se ProvinsI Banten Tahun 2012 .....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 4.1 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lebak Tahun 2002-2012 .....	64
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2012 .....	65
Tabel 4.3 Produktivitas Penduduk Usia 10 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama Tahun 2006-2012 .....	67
Tabel 4.4 Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Lebak Tahun 2010 – 2025 .....	69

Tabel 4.5 Sistem Pengembangan Wilayah Kabupaten Lebak .....	71
Tabel 4.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2012 .....	74
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Indeks <i>Location Quetien</i> (LQ) Kabupaten Lebak Tahun 2000-2012 .....	79
Tabel 4.8 Hasil Analisis <i>Shift Share</i> Kabupaten Lebak Tahun 2000-2012 .....	86
Tabel 4.9 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).....	91
Tabel 4.10 Hasil Analisis <i>Overlay</i> .....	96
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Analisis Gravitasi Kabupaten Lebak dengan Kabupaten/ kota Disekitarnya .....	99

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Lebak .....	58
Gambar 4.2 Persentase Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2010 .....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Banten .....	100
Lampiran 2 Perhitungan <i>Location Question</i> (LQ) .....	101
Lampiran 3 Lanjutan Hasil Perhitungan <i>Location Question</i> (LQ) .....	102
Lampiran 4 Menghitung <i>Shift Share</i> .....	103
Lampiran 5 Menghitung Model Rasio Pertumbuhan (MRP) .....	104
Lampiran 6 Lanjutan Menghitung Model Rasio Pertumbuhan (MRP) .....	105
Lampiran 7 Perhitungan Model Gravitasi .....	106
Lampiran 8 Peta Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan daerah DKI Jakarta dan Sukabumi.....	107



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa ini, pembangunan ekonomi merupakan salah satu permasalahan yang menjadi momok suatu negara. Tak ayal, hal tersebut selalu menjadi bagian dari program pemerintah setiap tahunnya. Pembangunan ekonomi menurut Meier (1995) (dalam Kuncoro,2006) adalah suatu proses adanya peningkatan pendapatan perkapita suatu negara selama kurun waktu yang panjang. Begitupun halnya yang dijelaskan Todaro (2000), pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses terencana yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja namun merupakan proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial atau menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dari aspek materi.

Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat dari aspek materi yaitu melalui tingkat pertumbuhan ekonominya (Nugraha dan Maruto, 2007). Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu target dalam proses pembangunan ekonomi. Bahkan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan meningkat dengan hanya melihat pada pertumbuhan ekonominya. Jika pertumbuhan ekonomi meningkat pada setiap tahunnya, maka dapat dikatakan pembangunan ekonomi pun meningkat (Dhyatmika, 2013).

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1999) yaitu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian tersebut menekankan pada suatu gambaran dalam waktu yang cukup lama dengan tidak hanya melihat kenaikan dari pendapatan nasional namun juga mempertimbangkan aspek pertumbuhan penduduk. Jadi, selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, salah satu tujuan utama dari usaha pembangunan ekonomi juga perlu adanya peningkatan standar hidup masyarakat (Todaro, 2006).

Tujuan dari usaha pembangunan ekonomi tidak hanya merupakan program dari pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah sedangkan pengertian pembangunan ekonomi dalam lingkup daerah yaitu suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya - sumberdaya yang ada dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Arsyad, 2002). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi daerah dilakukan guna mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dengan mengelola potensi sumber daya yang ada di masing-masing daerah (Dhyatmika, 2013).

Namun, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tentu tidak terlepas dari permasalahan ketidakmerataan atau kesenjangan antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Artinya, pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi belum tentu dapat mengatasi permasalahan yang ada pada suatu wilayah tersebut. Seperti yang dijelaskan Kuncoro (2002) yang relevan dengan kondisi di daerah

bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan syarat (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi proses pembangunan. Bahkan Arsyad (2010) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan, pengangguran dan distribusi yang timpang. Proses pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya tidak lagi hanya memfokuskan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melainkan kualitas dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Kualitas pertumbuhan ekonomi daerah itu terkait dengan berkurangnya tingkat kesenjangan antara daerah ekonomi maju dengan daerah yang lemah. Ketidakmerataan tersebut disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki satu daerah dengan daerah lainnya (Glasson, 1990). Oleh sebab itu, kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing daerah untuk mencapai proses pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pun sangat berbeda.

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu melalui peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2011). Undang-undang tersebut yaitu UU NO 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah juga mendorong adanya kerjasama antar satu daerah dengan daerah lainnya. Otonomi daerah memungkinkan daerah yang lebih maju membantu daerah disekitarnya yang lemah (Mangun, 2007).

Permasalahan yang biasanya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki tingkat ekonomi lemah yaitu belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian sehingga proses pembangunan ekonomi pun terhambat. Padahal, apabila ingin mencapai perubahan perekonomian yang lebih baik, masing-masing daerah setidaknya harus tahu betul potensi sumber daya yang dimilikinya dan mampu mengoptimalkan sumber daya tersebut (Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, 2010).

Salah satu contoh daerah yang memiliki tingkat ekonomi lemah yaitu Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang memiliki tingkat pertumbuhan ke dua paling rendah setelah Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berlangsung sejak Provinsi Banten melakukan pemekaran. Namun, sejak itu pula kedua kabupaten ini tidak pernah ada perubahan yang cukup pesat, apabila dilihat dari aspek pertumbuhan ekonominya. Tabel 1.1 menunjukkan data yang membandingkan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Banten dalam kurun waktu 2002-2011.

**Tabel 1.1**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/ Kota, Provinsi Banten**  
**Tahun 2002-2012**

Tahun	Kab. Pandeglang	Kab. Lebak	Kab. Tangerang	Kab. Serang	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kota Tangerang Selatan
2002	3,96	3,31	4,29	3,55	6,00	7,44	-	-
2003	4,56	3,46	4,95	4,21	6,90	7,11	-	-
2004	5,18	3,98	6,40	4,27	5,76	7,21	-	-
2005	4,83	3,74	7,32	4,40	6,89	6,23	-	-
2006	4,03	3,15	6,02	4,82	6,85	5,64	-	-
2007	4,08	4,90	6,48	4,71	6,86	5,48	6,30	-
2008	4,29	4,06	5,51	3,95	6,37	5,02	5,60	-
2009	5,43	5,18	4,41	3,18	5,74	5,08	5,74	8,49
2010	7,16	6,59	6,71	4,15	6,68	5,32	7,69	8,70
2011	5,25	5,57	6,72	5,18	6,84	6,55	7,85	8,52
2012*	5,62	5,01	6,22	5,10	6,41	6,82	7,06	8,24

\*: Angka Sementara

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Tabel 1.1 menunjukkan laju pertumbuhan kabupaten/ kota di Provinsi Banten pada tahun 2002 – 2011. Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota mengalami pertumbuhan yang positif selama kurun waktu 11 tahun. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung lambat terjadi pada kabupaten Serang, Kabupaten, Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Pada kurun waktu 11 tahun rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah dialami oleh Kabupaten Serang sebesar 4,32, Kabupaten Lebak sebesar 4,45, Kabupaten Pandeglang yaitu sebesar 4,94 sedangkan rata-rata pertumbuhan Kota Tangerang sebesar 6,48, Kota Cilegon sebesar 6,17, Kabupaten Tangerang yaitu 5,91 dan Kota Serang sebesar 6,70 serta Kota Tangerang Selatan sebesar 8,48.

Data yang ditunjukkan Tabel 1.1 didukung oleh hasil penelitian Priyanto (2009) bahwa Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang merupakan kabupaten yang berada pada kuadran empat berdasarkan *Klassen Typology*. Kuadran empat menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) serta memiliki pertumbuhan dan pendapatan perkapita dibawah angka provinsi. Aspek lain yang perlu dilihat apabila ingin mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah yaitu melalui pendapatan perkapita daerah tersebut.

**Tabel 1. 2**  
**Perkembangan PDRB Perkapita ADHK 2000 Menurut Kabupaten/ Kota**  
**diProvinsi Banten Tahun 2008-2011 (Rupiah)**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Kab. Pandeglang	6,175,220.06	6,570,864.61	7,327,761.55	8,277,399.00
Kab. Lebak	5,766,348.74	6,125,853.57	6,455,924.94	7,630,773.00
Kab. Tangerang	10,799,080.81	11,285,649.82	12,278,553.76	13,657,885.00
Kab. Serang	7,857,747.74	8,301,493.19	9,011,773.89	10,029,211.00
Kota Tangerang	26,305,612.76	28,183,725.12	31,671,749.08	34,522,085.00
Kota Cilegon	50,270,580.07	54,484,928.66	59,556,566.89	90,149,066.00
Kota Serang	7,911,939.24	8,514,055.26	9,381,081.42	10,877,228.00
Kota Tangerang Selatan	7,465,928.05	8,137,655.03	9,058,366.89	9,899,031.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Tabel 1.2 menunjukkan bagaimana pendapatan perkapita kabupaten/ kota di provinsi Banten dalam kurun waktu empat tahun yaitu dari tahun 2008-2011. Apabila melihat ketiga kabupaten yang termasuk dalam kuadran empat yaitu kabupaten yang tergolong dalam daerah relatif tertinggal, maka terlihat memang

Kabupaten Lebak adalah kabupaten dengan tingkat pendapatan perkapita paling rendah dibandingkan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Banten. Kemudian peringkat ke-2 terendah yaitu Kabupaten Pandeglang lalu Kabupaten Serang sedangkan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dari ketiga kabupaten tersebut adalah Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang serta Kota Cilegon.

Dyatmika (2013) juga membenarkan fenomena pendapatan perkapita yang ditunjukkan Tabel 1.2 bahwa memang Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon merupakan daerah yang berada di kuadran satu yaitu termasuk daerah yang maju dan tumbuh cepat sedangkan Kabupaten Lebak adalah kabupaten yang berada di kuadran empat yaitu daerah tertinggal. Bahkan hal tersebut dipertegas oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (2010) bahwa memang Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang termasuk daerah tertinggal.

Daerah tertinggal bukan berarti tanpa potensi. Begitupun halnya dengan kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak merupakan daerah yang memiliki banyak potensi. Baik dari aspek komoditas unggulan dan lokasi. Apabila dilihat dari aspek komoditas unggulan, Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian dengan produk unggulannya yaitu tanaman bahan makanan seperti padi, jangung, ubi jalar dan sayur-sayuran. Potensi dari aspek lokasi yaitu Kabupaten Lebak terletak di tempat yang strategis yaitu memiliki jarak yang dekat dengan Jakarta, Kota Bogor, Depok dan

Sukabumi. Kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lebak dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lebak. Selama periode pengamatan, tingkat kontribusi tertinggi diberikan oleh sektor pertanian kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa lalu sektor industri pengolahan, sektor pengangkutan dan komunikasi selanjutnya yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor Bangunan atau konstruksi, sektor pertambangan dan penggalian serta yang terakhir yaitu sektor listrik, gas dan air bersih.



**Tabel 1.3**  
**Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kabupaten Lebak Tahun 2000-2012 (dalam persentase)**

NO	SEKTOR	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	PERTANIAN	40,4	40,7	39,9	39,5	39,4	39,3	38,2	38,0	37,9	37,6	37,8	36,7	35,9
2	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	0,9	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,3
3	INDUSTRI PENGOLAHAN	9,2	9,2	9,3	9,5	9,5	9,6	9,8	9,7	9,6	9,2	8,9	8,7	8,6
4	LISTRIK , GAS DAN AIR BERSIH	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
5	BANGUNAN/ KONTSTRUKSI	4,0	3,9	3,9	3,9	3,8	3,9	4,0	4,3	4,3	4,4	4,4	4,5	4,7
6	PERDAGANGAN HOTEL DAN RESTORAN	23,5	23,1	23,1	22,8	23,0	22,9	22,9	23,0	23,1	23,1	23,6	24,4	24,8
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	4,8	5,3	5,3	5,4	5,5	5,7	6,0	6,0	4,5	6,2	6,2	6,2	6,4
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	3,8	3,9	4,4	4,9	4,8	4,7	4,7	4,6	6,1	4,8	4,8	4,8	4,9
9	JASA-JASA	13,0	12,6	12,6	12,6	12,4	12,4	12,8	12,6	12,9	13,2	12,8	12,9	13,1
	TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak

Sektor primer seperti sektor pertanian menopang perekonomian yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor sekunder seperti industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lebak belum mampu memberikan *value added* pada produk-produk sektor primer. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu dikarenakan pemerintah Kabupaten Lebak memang sangat fokus terhadap kondisi pertanian yang ada di Kabupaten Lebak. Bahkan pemerintah daerah mempertahankan ketersediaan lahan pertanian dalam kebijakan tata ruang wilayahnya. Sektor yang memiliki tingkat kontribusi tertinggi kedua yaitu sektor jasa-jasa. Namun, sektor jasa ini hanya tumbuh di wilayah perkotaan khususnya ibu kota kabupaten yaitu Kota Rangkasbitung. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki tingkat kontribusi tertinggi ketiga. Sektor ini merupakan sektor tersier yang apabila dikembangkan akan berdampak baik pada kondisi perekonomian. Salah satu contohnya yaitu pengembangan sektor perdagangan. Pemerintah dapat mengembangkan sektor ini melalui kegiatan jual beli produk bahan makanan. Lalu sektor yang berkontribusi tertinggi ketiga yaitu sektor industri pengolahan. Sektor ini merupakan sektor yang termasuk kedalam sektor sekunder. Tumbuhnya sektor sekunder ini bisa dikarenakan adanya peningkatan kegiatan dari sektor primer seperti pertanian. Selain itu, terdapat sektor yang memiliki tingkat kontribusi kelima yaitu pengangkutan dan komunikasi. Sektor pengangkutan dan komunikasi memiliki kontribusi yang cukup tinggi pula dikarenakan sektor ini merupakan sektor yang menjadi inti dari sebuah distribusi barang dan jasa. Selanjutnya yaitu sektor

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor ini merupakan sektor tersier yang akan terkena dampak dari tumbuhnya sektor-sektor primer dan sekunder. Apabila sektor primer dan sekunder dapat meningkatkan output nya maka hal ini akan mengundang investasi masuk ke daerah. Oleh karena itu, sektor tersier akan tumbuh seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Oleh karena perekonomian semakin tumbuh maka akan mendorong tumbuhnya sektor bangunan atau konstruksi dan ke sektor-sektor lainnya.

Produk pertanian yang unggul di Kabupaten Lebak adalah tanaman bahan makanan seperti padi, umbi-umbian, palawija serta buah-buahan. Output tanaman bahan makanan merupakan tertinggi dibandingkan dengan subsektor pertanian lainnya. Seperti ditunjukkan Tabel 1.4

**Tabel 1.4**  
**Output Tanaman Bahan Makanan Kabupaten Lebak**  
**Tahun 2000-2012 (dalam Juta Rupiah)**

<b>TAHUN</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>Kontribusi terhadap PDRB Khusus Sektor Pertanian (%)</b>
2000	1.098.064,06	70%
2001	1.159.058,24	72%
2002	1.175.628,07	70%
2003	1.203.822,36	72%
2004	1.249.501,50	71%
2005	1.291.646,00	66%
2006	1.294.831,38	25%
2007	1.351.926,04	26%
2008	1.402.893,29	26%
2009	1.464.061,43	26%
2010	1.570.601,09	26%
2011	1.610.386,11	26%
2012	1.653.902,67	23%

Sumber : BPS Kabupaten Lebak

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa pada tahun 2000 sampai dengan 2012 output tanaman bahan makanan selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 output tanaman bahan makanan hanya sebesar 1.098.064,06 juta sedangkan pada tahun 2012 output mencapai 1.653.902,67 juta. Kegiatan pada sektor basis ini

merupakan salah satu potensi yang apabila dioptimalkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Lebak. Namun, apabila dilihat dari kontribusi tanaman bahan makan terhadap PDRB khusus sektor pertanian, angka kontribusinya cenderung mengalami penurunan. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah tumbuhnya subsektor lain dari pertanian yang mengalami peningkatan secara khusus hanya di sektor produksi seperti subsektor perkebunan, peternakan dan kehutanan.

Kegiatan pada sektor unggulan atau sering disebut kegiatan basis juga mempunyai peranan penggerak utama (*prime mover role*) dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perubahan tersebut mempunyai *multiplier effect* terhadap perekonomian regional (Glasson, 1990). Salah satu kegiatan yang merupakan dampak positif dari adanya kegiatan basis tersebut yaitu biasanya masyarakat Kabupaten Lebak menjual hasil pertaniannya ke Jakarta menggunakan kereta api.

Selain itu, Kabupaten Lebak adalah kabupaten terluas di Provinsi Banten. Ditinjau dari segi luas wilayah, Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah sebesar 3.426 km<sup>2</sup> sedangkan Kabupaten Pandeglang hanya sebesar 2.746 km<sup>2</sup>, Kabupaten Tangerang mempunyai luas wilayah 1.011 km<sup>2</sup>, Kabupaten Serang sebesar 1.734 km<sup>2</sup>, luas wilayah Kota Tangerang sebesar 153 km<sup>2</sup>, Kota Cilegon sebesar 175 km<sup>2</sup>, Kota Serang sebesar 266 km<sup>2</sup> dan Kota Tangerang Selatan sebesar 147 km<sup>2</sup>. Namun demikian dengan luas wilayah yang relatif besar, jumlah penduduk Lebak lebih

sedikit dibanding kabupaten kota yang cukup maju di Provinsi Banten yaitu hanya sebanyak 1.259.660 jiwa, seperti terlihat pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5**  
**Perbandingan Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten/Kota se Provinsi Banten 2012**

<b>Kabupaten</b>	<b>Luas Wilayah (Km2)</b>	<b>Jumlah Penduduk (Jiwa)</b>
1. Pandeglang	2.746	1.172.179
2. Lebak	3.426	1.259.660
3. Tangerang	1.011	4.316.400
4. Serang	1.734	2.032.544
5. Kota Tangerang	153	1.869.791
6. Kota Cilegon	175	385.720
7. Kota Serang	266	672.833
8. Kota Tangerang Selatan	147	1.300.750

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

Sebenarnya, luas wilayah ini juga merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Lebak. Mengingat Kabupaten Lebak memiliki salah satu input yang penting dalam perekonomian yaitu tanah atau lahan. Seharusnya aspek ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk dijadikan sebagai lokasi untuk mengoptimalkan potensi sektor pertanian sehingga dapat mendorong berkembangnya perekonomian masyarakat Kabupaten Lebak.

Potensi Kabupaten Lebak lainnya yaitu dari aspek lokasi. Berdasarkan teori lokasi, Tarigan (2005:122) menyebutkan bahwa salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak yang tidak terlalu jauh dengan beberapa kota besar disekitarnya merupakan

keunggulan Kabupaten Lebak. Berdasarkan letaknya, Kabupaten Lebak memiliki lokasi yang strategis yaitu berdekatan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor dan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Kabupaten Lebak berada pada jalur transportasi kereta api regional yaitu kereta api dengan trayek mulai dari Jakarta - Kota Serang dan berakhir di Kota Cilegon, dimana daerah tersebut adalah daerah berkembang terutama Kota Cilegon yang merupakan pusat perdagangan karena adanya Pelabuhan Merak. Kondisi ini memungkinkan Kabupaten Lebak memiliki keuntungan sebagai berikut:

- Kabupaten Lebak akan berperan sebagai daerah transit bagi para pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi kereta api trayek Jakarta-Merak. Hal ini diharapkan akan mendorong perkembangan sektor perdagangan barang dan jasa terutama dalam distribusi produk potensi lokal.
- Kabupaten Lebak berperan sebagai terminal (pusat) perdagangan hasil pertanian bagi daerah sekitarnya serta sebagai pusat industri tanaman bahan makan. Mengingat potensi terbesar Lebak yaitu penghasil tanaman bahan makan seperti padi, umbi-umbian, palawija dan lain sebagainya.
- Selain itu, Kota Rangkasbitung yang merupakan ibu kota Kabupaten Lebak memiliki stasiun yang menjadi pemberhentian kereta api lintas Provinsi Jawa Tengah-Banten, adanya *commuter line* serta kereta eksekutif lainnya dapat membuka peluang bagi Kabupaten Lebak untuk lebih berkembang. Terutama bagi sektor-sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata.

Namun ternyata permasalahan yang dihadapi daerah tertinggal pada umumnya adalah belum optimalnya pengembangan potensi sumber daya lokal dalam perekonomian (Kementerian Daerah Tertinggal, 2011). Terbukti dengan berbagai potensi yang dimilikinya, Kabupaten Lebak masih menjadi kabupaten yang relatif tertinggal (Dhyatmika, 2013). Oleh karena itu, kajian mengenai upaya pengembangan wilayah khususnya pengembangan wilayah dibidang ekonomi melalui penentuan potensi ekonomi terkait dengan sektor-sektor unggulan sangat diperlukan. Pengembangan wilayah merupakan upaya yang dilakukan untuk mendorong perkembangan sosial, ekonomi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di suatu wilayah serta mengurangi kesenjangan antar wilayah (Zulaechah, 2011). Selain itu juga pentingnya mengetahui interaksi daerah antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan apabila terdapat interaksi yang kuat antar daerah maka perencanaan pengembangan wilayah akan mengarah pada kerjasama antar daerah sehingga diharapkan dapat kedua daerah tersebut akan saling membantu dalam upaya meningkatkan perekonomiannya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Kabupaten Lebak merupakan salah satu Kabupaten di provinsi Banten. Berdasarkan luas wilayah nya, Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah paling besar dibandingkan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Banten. Selain itu, Kabupaten Lebak juga terletak pada wilayah yang strategis yaitu memiliki jarak yang cukup dekat dengan DKI Jakarta. Kemudahan akses antara kedua daerah tersebut pun sudah



tersedia seperti adanya transportasi kereta api. Idealnya, potensi yang dimiliki Kabupaten Lebak ini seharusnya dapat memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan perekonomian Kabupaten Lebak itu sendiri. Walaupun pertumbuhan ekonomi pada Tabel 1.1, Kabupaten Lebak adalah terendah ketiga setelah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, ternyata apabila dilihat dari aspek perekonomian masyarakatnya, Kabupaten Lebak tidak lebih baik dari kabupaten/ kota lainnya seperti yang terlihat pada Tabel 1.3. Ironisnya, Kabupaten Lebak ternyata merupakan salah satu daerah tertinggal di Provinsi Banten seperti yang diinformasikan Kementerian Daerah Tertinggal pada tahun 2010 serta penelitian dari Priyanto (2009) dan Dhyatmika (2013). Oleh karena itu diperlukan upaya pengembangan wilayah salah satu nya yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak melalui pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Sektor apa yang menjadi sektor basis untuk prioritas pengembangan pembangunan di Kabupaten Lebak?
2. Sektor apa yang potensial dan mempunyai keunggulan kompetitif serta spesialisasi untuk dikembangkan berdasarkan penentuan sektor basis?
3. Bagaimana interaksi antara kabupaten Lebak dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi Banten?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menentukan sektor basis untuk prioritas pengembangan pembangunan di Kabupaten Lebak
2. Mengidentifikasi sektor potensial yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi untuk dikembangkan berdasarkan penentuan sektor basis
3. Menganalisis interaksi kabupaten Lebak dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Banten

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang berminat dibidang yang sama.

1. Memudahkan pemerintah kabupaten Lebak membuat rencana kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi dan tipologi yang dimiliki kabupaten Lebak.
2. Sebagai bahan informasi untuk dipertimbangkan oleh pemerintah kabupaten Lebak tentang kinerja masing-masing sektor.
3. Menambah referensi tentang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah untuk dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan mengapa memilih Kabupaten Lebak sebagai studi kasus dari penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

## BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan teori-teori yang menjadi landasan berfikir. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, sektor potensial dalam pengembangan wilayah, teori pertumbuhan ekonomi, teori pusat pertumbuhan dan model gravitasi. Selain itu, juga terdapat penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penulis tentang penelitian yang akan dilakukan.

## BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

## BAB IV: Pembahasan

Bab ini merupakan hasil dan pembahasan, berisi tentang deskripsi objek penelitian dan hasil analisis data serta pembahasannya.

## BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran atas penelitian yang dilakukan berkaitan dengan potensi dan pengembangan wilayah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian yang beragam. Tergantung pada cakupan penelitiannya. Tentunya pengertian dari keduanya pun berbeda. Pembangunan ekonomi menurut Schumpeter dan Ursula (1934) (dalam Jhinghan, 2010) adalah pembangunan ekonomi memfokuskan pada masalah negara berkembang sedangkan pertumbuhan ekonomi memfokuskan pada masalah negara maju. Umumnya, masalah negara berkembang menyangkut pada pengembangan sumber daya yang tidak atau belum digunakan, walaupun penggunaannya telah cukup dikenal sedangkan permasalahan negara maju terkait dengan keberadaan sumber-sumber ekonomi yang telah digunakan pada batas tertentu (Zulaechah, 2011).

Pembangunan merupakan produk sejarah. Pada mulanya pembangunan hanya fokus pada upaya peningkatan pendapatan seperti *Gross National Product* (GNP). Hal tersebut terjadi pada tahun 1950 sampai dengan awal tahun 1960an setiap negara di dunia ketiga setuju untuk menjadikan pendapatan sebagai target utama dari usaha pembangunan akan tetapi tidak ada peningkatan tingkat kualitas kehidupan dari masyarakatnya. Selain itu fenomena yang muncul saat adanya peningkatan GNP juga meningkatnya kemiskinan absolut, ketimpangan distribusi pendapatan dan pengangguran. Oleh karena itu pada tahun 1970 pembangunan ekonomi mengalami

perubahan definisi yaitu pembangunan yang mengarah pada penurunan keiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000).

Pembangunan merupakan suatu proses terencana menuju keadaan yang lebih baik. Meier (1995) (dalam Kuncoro, 2006) menyebutkan bahwa pembangunan adalah suatu proses pendapatan perkapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup “dibawah garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Selain itu, Rostow (1960) menjelaskan bahwa proses pembangunan terbagi menjadi lima tahapan, yaitu:

#### 1. *Tradisional*

Daerah pada tahapan ini memiliki kemampuan terbatas atas kepemilikan teknologi dibanding daerah lainnya dan kemungkinan memiliki kehidupan pada sosial budaya yang sudah ada.

#### 2. *Take Off Precondition*

Perekonomian daerah dan sosial – budaya sudah mulai berubah. Hal ini terjadi ketika daerah yang sudah berkembang berinvestasi pada daerah – daerah yang belum berkembang seperti investasi pada transportasi, komunikasi, dan kegiatan memproduksi barang dan jasa. Selain itu, daerah yang sudah berkembang juga

memberikan bantuan tenaga ahli untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja pada daerah yang belum berkembang.

### 3. *Take Off*

Tahapan *take off* ini akan terjadi ketika sudah ada stimulus eksternal seperti adanya investasi dan terdapat suatu sistem sosial dan politik guna mencapai investasi yang berkesinambungan.

### 4. *Maturity*

*Maturity* adalah tahapan dimana suatu daerah mampu mendorong investasi yang berkesinambungan dalam aspek pertahanan dan industri dibidang bahan kimia.

### 5. *Mass Consumption*

*Mass Consumption* adalah tahapan yang terjadi ketika suatu daerah mampu melakukan lebih banyak ekspor dibanding impor.

Berbeda dengan pengertian pembangunan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian yang cakupan lebih sempit. Pertumbuhan ekonomi menurut Sumitro Djohadikusumo (1987) dalam Budiantoro (2008) lebih memfokuskan pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator keberhasilan dari suatu proses pembangunan ekonomi.

Menurut Boediono (1999) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian tersebut menekankan pada aspek proses output perkapita dan waktu jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu

proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Artinya, aspek tersebut bersifat dinamis mencakup peningkatan output yang diimbangi dengan peningkatan kemampuan penduduk dalam memproduksi output tersebut dalam waktu yang cukup panjang.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat pada suatu periode tertentu (Laksani, 2010). Seperti halnya menurut Case dan Fair (2007) pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output atas penambahan faktor produksi. Bahkan Kuznet (1959) menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah hanya terdapat peningkatan output pada suatu negara saja melainkan mampu menyediakan berbagai barang ekonomi untuk penduduknya dalam waktu yang cukup panjang. Formula yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yaitu:

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100 \quad (2.1)$$

Keterangan :

$PDB_t$  : PDB pada tahun tertentu

$PDB_t - 1$  : PDB pada tahun sebelumnya

Berdasarkan formula 2.1 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara membandingkan PDB pada tahun tertentu ( $PDB_t$ ) dengan PDB sebelumnya ( $PDB_{t-1}$ ).

### **2.1.2. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Apabila ingin mengetahui arti pembangunan daerah, maka perlu mengetahui pengertian daerah terlebih dahulu. Pengertian daerah ditinjau dari aspek ekonominya, daerah terbagi menjadi tiga pengertian (Arsyad, 2002), yaitu :

- a. Daerah homogen adalah suatu daerah yang kegiatan ekonominya terjadi diberbagai pelosok ruang dan terdapat sifat-sifat yang sama, baik dari segi pendapatan perkapita, sosial budaya, geografi serta hal lainnya.
- b. Daerah nodal yaitu suatu daerah yang kegiatan ekonominya dikuasi oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
- c. Daerah perencanaan atau daerah administrasi adalah suatu daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya.

Menurut Arsyad (2002) pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi daerah tidak hanya menekankan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi melainkan mengarah pada kualitas dari peningkatan tersebut. Beberapa ahli menganjurkan bahwa sebaiknya pembangunan memiliki tiga nilai (Todaro,2000) yaitu:



1. Ketahanan (*Sustenance*): Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*): Pembangunan haruslah memanusiakan orang.
3. *Freedom from servitude*: Kebebasan bagi setiap individu suatu daerah untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Selain itu, menurut Nelson (1990) bahwa pembangunan ekonomi daerah yaitu perubahan yang terjadi pada suatu daerah terkait dengan produktivitas yang diukur melalui populasi, tenaga kerja, pendapatan dan nilai tambah dari sektor-sektor yang ada pada daerah tersebut. Hal itu juga menyangkut pembangunan dibidang sosial.

Permasalahan yang biasanya muncul saat proses pembangunan daerah tersebut dilaksanakan adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang seharusnya didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan potensi daerah tersebut seperti potensi sumberdaya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik secara lokal. Hal ini bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan baru sesuai dengan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut sehingga pemerintah beserta masyarakatnya perlu mengidentifikasi potensi-potesni yang dimiliki daerah tersebut guna merangsang peningkatan kegiatan ekonomi dan proses pembangunan ekonomi daerah dapat tercapai.

Proses pembangunan ekonomi daerah tidak akan terwujud apabila tidak memperhatikan proses pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah juga dapat dilihat bagaimana produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah (Dhyatmika, 2013). Oleh karena itu, terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi makro yang diadaptasi pada lingkup daerah. Teori tersebut antara lain teori Teori Basis Ekonomi, Teori Pertumbuhan Jalur Cepat (*turnpike*), Teori Pertumbuhan Interregional (Tarigan, 2005).

#### **2.1.2.1. Teori Basis Ekonomi**

Teori ini merupakan teori yang membagi kegiatan produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat pada suatu wilayah menjadi pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan *service* (pelayanan) atau sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat eksogen artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya sedangkan sektor non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat didaerah itu sendiri. Oleh karena itu, teori ini tergantung pada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat *endogeneous* (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhan tersebut tergantung pada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2005).

Selain itu, dasar pemikiran teknik ini adalah teori *economic base* yang intinya adalah karena sektor basis menghasilkan barang-barang dan jasa untuk pasar didaerah maupun diluar daerah yang bersangkutan. Maka, penjualan ke luar daerah akan

menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Peningkatan pendapatan itu tidak hanya akan menaikkan permintaan pada sektor basis, tetapi juga menaikkan permintaan terhadap industri non basis. Dengan kata lain penanaman modal di sektor-sektor selain basis merupakan investasi sebagai akibat dari kenaikan pendapatan pada sektor basis. Asumsi teknik ini adalah penduduk di daerah studi juga mempunyai pola permintaan pada tingkat wilayah referensi (pola pengeluaran secara geografis sama) dan produktivitas tenaga kerja sama serta setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor (Arsyad, 2002).

Sutikno dan Maryunani (2007) menyebutkan bahwa semakin banyak sektor basis pada suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa didalamnya dan meningkatkan nilai investasi serta menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis. Oleh sebab itu, sebenarnya kegiatan basis memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak pertama yang akan berdampak pada setiap perubahan pendapatan sektor tersebut serta memberikan efek pengganda terhadap perekonomian agregat daerah. Adapun formula yang digunakan untuk mengetahui sektor basis dan non basis (Arsyad, 2002) adalah:

$$LQ = \frac{si / S}{ni / N} \quad (2. 2)$$

Keterangan:

LQ: Indeks Location Quotient

si: PDRB Sektor i wilayah studi dalam juta rupiah

S: PDRB total wilayah studi dalam juta rupiah

ni: PDRB sektor i wilayah referensi dalam juta rupiah

N: PDRB total wilayah referensi

Apabila nilai LQ sudah diketahui, maka terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menentukan sektor basis, yaitu :

- a. Apabila nilai  $LQ > 1$  artinya sektor tersebut memiliki peranan yang sangat dominan di daerah studi dibanding dengan peranan sektor yang sama di daerah referensi. Nilai  $LQ > 1$  seringkali juga dijadikan acuan untuk mengetahui suatu daerah unggul dalam sektor yang menjadi sektor basis tersebut.
- b.  $LQ = 1$  artinya sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan di daerah yang memiliki sektor tersebut.
- c. Apabila nilai  $LQ < 1$  artinya peranan sektor tersebut di daerah studi lebih kecil dari pada peranan sektor tersebut di wilayah referensi.

#### **2.1.2.2. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat**

Teori pertumbuhan jalur cepat (*Turnpike*) diperkenalkan oleh Samuelson (2006). Setiap negara atau wilayah perlu melihat sektor atau komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan

(Tarigan, 2005). Artinya dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat berproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian cukup besar agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus dapat menembus dan bersaing di pasar luar negeri.

Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat semua sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Misalnya, usaha perkebunan yang dibuat bersinergi dengan usaha peternakan. Rumput/limbah perkebunan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman perkebunan. Contoh lain adalah usaha pengangkutan dan usaha perbengkelan. Dengan demikian, pertumbuhan sektor yang satu mendorong pertumbuhan yang lain, begitu juga sebaliknya. Menggabungkan kebijakan jalur ceoat (*turnpike*) dan mensinergikan dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.

### **2.1.2.3. Teori Pertumbuhan Interregional**

Teori ini merupakan perluasan dari teori basis ekspor. Apabila teori basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah disekitarnya. Model ini memasukkan dampak dari daerah-daerah yang berada disekitar daerah studi. Pada hakikatnya, satu daerah dengan daerah lain memiliki keterkaitan. Kegiatan yang dilakukan oleh daerah lain dapat berpengaruh positif atau negatif terhadap suatu daerah tertentu. Model ini memiliki dua model skenario tentang pertumbuhan antar daerah (Wijaya dan Atmanti, 2006) yaitu:

- a. Adanya surplus impor yang dikarenakan terdapat peningkatan pendapatan pada suatu daerah (I). Peningkatan pendapatan tersebut menyebabkan investasi masuk ke daerah tersebut setelah itu banyak tenaga kerja yang ingin bekerja di daerah (I) dan mendorong peningkatan impor. Apabila terdapat peningkatan impor pada suatu daerah (I) artinya daerah lain justru meningkatkan eksportnya. Pada akhirnya dapat mendorong pemerataan pembangunan.
- b. Adanya surplus impor dikarenakan kegiatan produksi pada suatu daerah (I) mengalami penurunan. Kondisi tersebut mendorong keluarnya investasi ke luar daerah karena dianggap berinvestasi di daerah tersebut (I) tidak menguntungkan investor. Impor daerah yang menjadi tujuan investasi meningkat sedangkan daerah yang mengalami penurunan produksi (I) juga mendorong keluarnya tenaga kerja dari daerah tersebut. Sehingga pertumbuhan daerah (I) menurun dan mendorong penurunan pembangunan ekonomi.

Masalah kunci untuk daerah I adalah pada saat impor daerah sekitarnya meningkat, seberapa jauh kebutuhan impor dapat dipenuhi daerah I. Apabila ekspor daerah I hanya meningkat sedikit, daerah tersebut akan tertinggal. Sebaliknya, apabila ekspor daerah I naik cukup tinggi maka pendapatan daerah I akan meningkat mengejar daerah sekitarnya. Model interregional terlihat bahwa kemampuan untuk meningkatkan ekspor sangat berpengaruh dalam menjamin kelangsungan

pertumbuhan suatu daerah dan menciptakan pemerataan pertumbuhan antar daerah (Tarigan, 2005).

### **2.1.3. Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah merupakan salah satu hal yang penting dan harus ada dalam tujuan perencanaan daerah. Pengembangan wilayah perlu didasarkan pada potensi fisik, sosial dan budaya yang ada di daerah tersebut. Pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi- kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di daerah tersebut dan dalam skala nasional (Mulyanto, 2008).

Tujuan dari pengembangan wilayah terdiri dari 3 aspek yaitu:

#### **1. Sosial**

Usaha – usaha mencapai pemenuhan kebutuhan- kebutuhan dan peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan individu, keluarga dan seluruh masyarakat di dalam wilayah tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan mengurangi pengguran dan menyediakan sarana dan prasarana kehidupan yang baik seperti pemukiman, fasilitas transportasi, kesehatan, air minum dan lainnya.

## 2. Ekonomi

Usaha-usaha mempertahankan dan memacu perkembangan dan pertumbuhan kesinambungan dan perbaikan kondisi- kondisi ekonomis yang baik bagi kehidupan dan memungkinkan pertumbuhan yang lebih tinggi.

## 3. Wawasan Lingkungan

Pencegahan kerusakan dan pelestarian terhadap keseimbangan lingkungan. Aktivitas ekonomi apapun yang manusia lakukan dengan mengambil sesuatu dari atau memanfaatkan potensi alam akan mempengaruhi keberlangsungan alam itu sendiri.

Strategi Pengembangan wilayah terbagi dalam 2 aspek (Rustiadi, 2009) yaitu melalui *demand side* dan *supply side*. Strategi *demand side* adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui peningkatan barang-barang dan jasa-jasa dari masyarakat setempat melalui kegiatan produksi lokal. Tujuan pengembangan wilayah secara umum adalah meningkatkan taraf hidup penduduk. Peningkatan taraf hidup tersebut diharapkan akan meningkatkan perkembangan sektor industri dan jasa-jasa yang akan lebih mendorong perkembangan wilayah tersebut. Strategi *supply side* yaitu suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui investasi modal untuk kegiatan-kegiatan produksi yang berorientasi keluar daerah maupun luar negeri. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk meningkatkan pasokan dari komoditi yang pada umumnya diproses dari sumber daya lokal. Kegiatan produksi terutama ditujukan untuk tujuan ekspor ke daerah lain



ataupun ke luar negeri diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan lokal. Selanjutnya, akan menarik kegiatan lain untuk datang ke wilayah tersebut.

#### **2.1.4. Sektor Potensial dalam Pengembangan Wilayah**

Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk merangsang perkembangan sosial ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan hidup di suatu wilayah serta mengurangi kesenjangan antar wilayah (Zulaechah, 2011). Penerapan kebijakan pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut (Susantono, 2009).

Dalam upaya pengembangan wilayah tidak dapat dilakukan pengembangan terhadap semua sektor secara serentak akan tetapi diprioritaskan pada beberapa sektor yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan sektor yang memiliki potensi cukup besar itu dapat berkembang pesat dan mampu merangsang tumbuhnya sektor lain.

Berkembangnya sektor lain akibat tumbuhnya sektor potensial dapat menciptakan peluang bagi sektor lain baik sebagai *input* bagi sektor potensial maupun sebagai imbas dari meningkatnya kebutuhan tenaga kerja sektor potensial yang mengalami peningkatan output. Oleh karena itu, upaya memprioritaskan sektor potensial untuk dikembangkan merupakan langkah awal dalam pengembangan perekonomian wilayah. Guna mengetahui sektor yang memiliki potensi yang dapat

dikembangkan yaitu dengan menganalisisnya menggunakan Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP).

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan perbandingan pertumbuhan suatu kegiatan dalam suatu wilayah referensi dan wilayah studi. Model rasio pertumbuhan adalah perbandingan pertumbuhan suatu kegiatan dalam wilayah referensi (Provinsi Banten) dan wilayah studi (Kabupaten Lebak). Pendekatan MRP ini juga dibagi menjadi dua, yaitu:

#### 1. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)

Rasio pertumbuhan wilayah referensi yaitu membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor dalam konteks wilayah referensi (Provinsi Banten) dengan PDRB Kabupaten Lebak.

$$\text{Rumus RPr} = \frac{\Delta E_{N,i,t} / E_{N,i,t}}{\Delta E_{N,t} / E_{N,t-n}} \quad (2.3)$$

Keterangan :

RPr : Rasio pertumbuhan wilayah referensi (Provinsi Banten)

$\Delta$  : Perubahan, tahun akhir dikurangi dengan tahun awal

$E_{N,i}$  : PDRB sektor i di Provinsi Banten

$E_N$  : PDRB di provinsi Banten

t : tahun

t-n : tahun awal

Jika RPr lebih besar dari 1 maka RPr dikatakan (+), yang berarti pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam tingkat Provinsi Banten lebih tinggi dari pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten Lebak dan jika RPr lebih kecil dari 1 dikatakan (-), yang berarti bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu dalam tingkat Provinsi Banten lebih rendah dari pertumbuhan sektor yang sama di pada tingkat Kabupaten Lebak.

## 2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)

Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) memiliki perbedaan dengan RPr. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS) yaitu membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor khusus di wilayah studi (Kabupaten Lebak) dengan pertumbuhan sektoral Provinsi Banten. Rumus RPs adalah:

$$RPs = \frac{\Delta Er,i,t / \Delta Er,i,t-n}{\Delta EN,i,t / \Delta EN,i,t-n} \quad (2.4)$$

Keterangan:

RPs = Rasio pertumbuhan wilayah studi (Kabupaten Lebak)

$\Delta Er, I$  = Perubahan PDRB sektor tertentu pada daerah studi (PDRB tahun akhir dikurangi dengan PDRB tahun awal)

$\Delta EN, i$  = Perubahan PDRB sektor tertentu pada daerah referensi (PDRB tahun akhir dikurangi dengan PDRB tahun awal)

t = Tahun

t - n = Tahun Awal

Nilai RPs positif (+) apabila nilai pertumbuhan suatu kegiatan di Kabupaten Lebak lebih tinggi dibanding nilai RPs sektor yang sama di Provinsi Banten,

demikian sebaliknya jika RPs negatif (-). Analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan nilai nominal kemudian hasil kombinasi keduanya dapat diperoleh deskripsi sektor ekonomi yang potensial dikembangkan di suatu kabupaten pada provinsi yang dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian (Yusuf, 1999) yaitu:

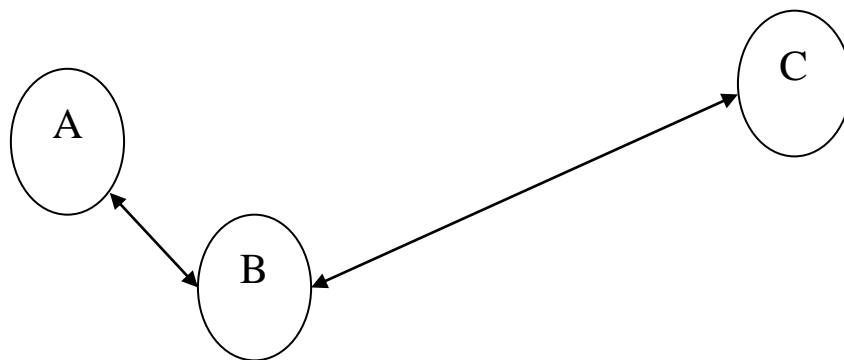
- a. Klasifikasi pertama, yaitu nilai RPr (+) dan RPs (+) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Sektor ini disebut sebagai dominan pertumbuhan.
- b. Klasifikasi kedua, yaitu nilai RPr (+) dan RPs (-) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol ditingkat provinsi, namun belum menonjol di tingkat kabupaten.
- c. Klasifikasi ketiga, yaitu nilai RPr (-) dan RPs (+) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol ditingkat provinsi sementara pada tingkat kabupaten/ kota termasuk menonjol.
- d. Klasifikasi keempat, yaitu nilai RPr (-) dan RPs(-) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang rendah baik di tingkat kabupaten/ kota maupun di tingkat provinsi.

#### **2.1.5. Model Gravitasi**

Model Gravitasi ini digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Berdasarkan hasil penelitiannya, Reilly (1929) (dalam Nelson, 1990) berpendapat bahwa kekuatan interaksi antara dua wilayah yang

berbeda dapat diukur dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayah tersebut. Model gravitasi menurut Tarigan (2005) adalah model yang sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut.

**Gambar 2. 1**  
**Ilustrasi interaksi antar wilayah**



Sumber : Maulana (2013) Diakses pada tanggal 22 April 2014

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa misalnya ada dua kota (Kota A dan Kota B) yang berdekatan ingin diketahui berapa besarnya interaksi antara kedua kota tersebut. Interaksi bisa saja diukur dari banyaknya perjalanan (*trip*) dari penduduk kota A ke kota B atau sebaliknya. Interaksi tersebut ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu luas wilayah kedua kota tersebut. Sebuah daerah dapat diukur dari jumlah penduduk, banyaknya lapangan kerja, total pendapatan (nilai tambah), jumlah atau luas bangunan, banyaknya fasilitas kepentingan umum dan lain-lain. Kedua, faktor jarak antara kota A dan kota B. Jarak mempengaruhi keinginan orang untuk bepergian karena untuk menempuh jarak tersebut diperlukan waktu, tenaga dan biaya.

Semakin jauh jarak yang memisahkan kedua lokasi, makin rendah keinginan orang untuk bepergian atau akan menghambat mobilitas barang. Guna mengukur kekuatan interaksi wilayah digunakan formula sebagai berikut:

$$I_{A,B} = k \cdot \frac{P_A \cdot P_B}{(D_{A,B})^2} \quad (2.5)$$

Keterangan:

$I_{A,B}$  = Kekuatan interaksi antar wilayah A dan B

$k$  = Angka konstanta empiris nilainya 1

$P_A$  = Jumlah penduduk wilayah A

$P_B$  = Jumlah penduduk wilayah B

$D_{A,B}$  = Jarak wilayah A dan wilayah B

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa model gravitasi ini digunakan untuk mengetahui interaksi antar daerah. Sebenarnya tidak ada daerah yang bisa memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri melainkan saling membutuhkan dengan daerah lainnya sehingga terdapat interaksi ekonomi yang terjalin. Namun, yang membedakan adalah tingkat kekuatan interaksi tersebut. Kuatnya interaksi antara satu daerah tertentu dengan daerah lainnya dapat mendorong peningkatan penawaran dan permintaan antar kedua daerah tersebut.

#### **2.1.6. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang digunakan sebagai acuan utama adalah Sudarmono (2006), Wijaya

dan Atmanti (2006), Mangun (2007), Munandar (2010) dan Zulaechah (2011). Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan diantaranya yaitu pemilihan obyek penelitian yang berdasar pada fenomena ketertinggalan ekonomi daerah dan sumber daya manusia yang relatif rendah. Beberapa penelitian terdahulu tersebut diringkas dalam Tabel 2.1 berikut ini:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	JUDUL / PENULIS/ TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL
1	Judul : Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah Di Wilayah Pembangunan I Jateng  Penulis : Mulyanto Sudarmono  Tahun : 2006	Tujuan : a. Mengetahui terjadinya transformasi stuktural dan ketimpangan antar daerah di wilayah pembangunan I Jawa Tengah. b. Mengetahui ketimpangan antar daerah di wilayah pembangunan I Jawa Tengah c. Mengetahui hubungan antar variabel pertumbuhan ekonomi dengan variabel ketimpangan.	LQ, Shift Share, Model Rasio Pertumbuhan dan Overlay serta Indeks Williamson, indeks Entropi Theil dan analisis korelasi	a. Transformasi struktural hanya terjadi di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Taransformasi tersebut juga tidak diikuti dengan pergeseran penyerapan tenaga kerja sektoral dari sektor pertanian ke sektor industri di kedua kabupaten tersebut. Terjadinya dualisme transformasi struktural. b. Terjadi kecenderungan nilai Indeks Enrophy Theil dan Indeks Williamson, artinya bahwa ketimpangan yang terjadi di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah semakin membesar atau semakin tidak merata. c. Ternyata hipotesis Kuznet yang menunjukkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan terjadi di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah.



**Lanjutan Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

NO	JUDUL/ PENULS/ TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL
2	<p>Judul : Analisis Pengembangan Wilayah dan Sektor Potensial Guna Mendorong Pembangunan di Kota Salatiga</p> <p>Penulis: Bayu Wijaya dan Hastarini Dwi Atmanti</p> <p>Tahun : Vol 3/ No.2/ Desember Tahun : 2006</p>	<p>Tujuan: Mengidentifikasi strategi sektor di kota Salatiga yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan GDP. Sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mendorong pembangunan kabupaten.</p>	<p>LQ, Shift Share, Analisis Gravitasi, SWOT</p>	<p>Selama periode 1994-2002, kota Slatiga memiliki sektor basis atau berpotensi ekspor yaitu disektor listrik, gas dan air bersih, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa. Analisis Shift Share: Diketahui bahwa kota Salatiga memiliki pertumbuhan yang lambat dari pada pertumbuhan provinsi Jawa Tengah. Terbukti bahwa nilai penyimpangan negative sebesar 327,61</p> <p>Analisis Gravitasi : Hubugan tererat yaitu dengan kabupaten Semarang yaitu senilai 5.650.796.005,71.</p> <p>Terdapat 4 sektor yang sangat berpotensi untuk dikembangkan yaitu melalui sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor jasa-jasa dan ada satu sektor potensial untuk dikembangkan yaitu sektor listrik,gas dan air bersih, serta ada 2 yang perlu untuk</p>

**Lanjutan Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	JUDUL/ PENULS/ TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL
				dikembangkan lebih lanjut yaitu sektor pertanian dan sektor industri pengolahan
3	Judul : Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sulawesi Tengah Penulis : Nadiatulhuda Mangun Tahun: 2007	Tujuan: a. Mengidentifikasi sektor basis yang memiliki tingkat kompetitif yang tinggi dan spesialisasi dari masing-masing kabupaten dan kota.  b. Mengidentifikasi <i>typology</i> area dan sektor prioritas yang akan menunjang pembangunan di Sulawesi Tengah	LQ, Shift Share, MRP, Typology Klassen	Hasil: Pertanian merupakan sektor basis atau sektor yang paling dominan dibanding sektor lainnya. Proses industri terjadi di 6 sektor dan hanya terkonsentrasi di Palu. Berdasarkan Typologi Klassen maka diketahui tidak ada kabupaten Kota yang masuk kedalam daerah yang cepat tumbuh dan cepat berkembang. 3 Kabupaten/kota termasuk kedalam daerah yang lambat tumbuh dan 7 kabupaten/kota disekitarnya. Kesimpulannya adalah kabupaten Una-Una harus memiliki prioritas pembangunan semua sektornya.

**Lanjutan Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	JUDUL/ PENULS/ TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL
4	Judul : Analisis Ekonomi dan Potensi Pengembangan Wilayah Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen Penulis : Aris Munandar Tahun : 2010	Tujuan : a. Mengidentifikasi letak strategis Kecamatan Gemolong yang berada di perempatan antara Kabupaten Grobogan dan Kotamadya Surakarta, serta antara kabupaten Sragen dengan kabupaten Boyolali/Salatiga mempunyai peran penting dalam peningkatan b. Apakah kawasan Industri dan industri kecil, pertokoan, rumah makan, maupun rumah sakit masih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kecamatan Gemolong secara signifikan ? c. Apakah terjadi perubahan sektor basis ke non basis di Kecamatan Gemolong ?	SFA ( <i>Settlement Function Analysis</i> ), Analisis Skalogram, LQ, Shift Share	Gemolong memiliki potensi yang cukup bagus. Khususnya jika dilihat dari aspek topografi, Gemolong berada diantara Sragen – Boyolali. Terdapat beberapa sektor yang harus dikembangkan adalah pertanian. Permasalahan produktivitas yang selalu menurun harus diatasi, mulai dari bagaimana meningkatkan produktivitas melalui adanya value adde yang bisa meningkatkan pasar bagi produk pertanian tersebut. b. Secara ekonomi ada separo sektor di Kecamatan Gemolong yang basis, dan separo sisanya masuk dalam non basis, sektor-sektor non basis ini harus lebih dikembangkan seperti sektor pertanian yang selalu menurun karena memang sumber daya air permukaan yang kurang mendukung serta kurangnya jaringan irigasi sehingga kedepannya perlu

**Penelitian Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

NO	JUDUL/ PENULS/ TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL
				<p>dipikirkan bagaimana mengelola sektor pertanian berbasis hortikultura atau perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi sampai ke pemasarannya, sektor pertambangan agar ditingkatkan dari hanya menggali diubah menjadi ke pengolah bahan galian sehingga ada peningkatan nilai tambah dari hasil bahan galian yang diambil, untuk meningkatkan transportasi perlu dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas jalan kolektor maupun antar wilayah/ kecamatan terhubung dengan jalan arteri primer maupun arteri sekundair , sehingga produksi olahan dapat terkirim dengan lancar, atau secara umum akan ada peningkatan pendapatan masyarakat dari nilai tambah yang dihasilkan. Sedangkan sektor-sektor</p>

**Lanjutan Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	JUDUL/ PENULS/ TAHUN	TUJUAN	METODE	HASIL
				yang sudah basis agar terus ditingkatkan dengan tetap mengacu pada standar perijinan dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Ibu Kota Kecamatan Gemolong maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
5	Judul : Analisis Pengembangan Kota Magelang Sebagai Pusat Pertumbuhan Kawasan Purwomanggung Jawa Tengah Penulis: Retno Zulaechah Tahun: 2011	Tujuan: 1. Mengidentifikasi interaksi ekonomi kota Magelang dengan daerah dibelakangnya dan menganalisis sektor potensial untuk pengembangan kota Magelang	Model Gravitasi, LQ, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Overlay dan Shift Share	Penetapan Kota Magelang sebagai pusat pertumbuhan kurang tepat karena lemahnya interaksi ekonomi kota Magelang dengan daerah belakangnya, selain itu walaupun memiliki sektor potensial akan tetapi pertumbuhan sektor tersebut masih lambat. Daerah yang memiliki keterkaitan yang kuat adalah dengan kabupaten Magelang dan Temanggung yang dapat

**Lanjutan Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu**

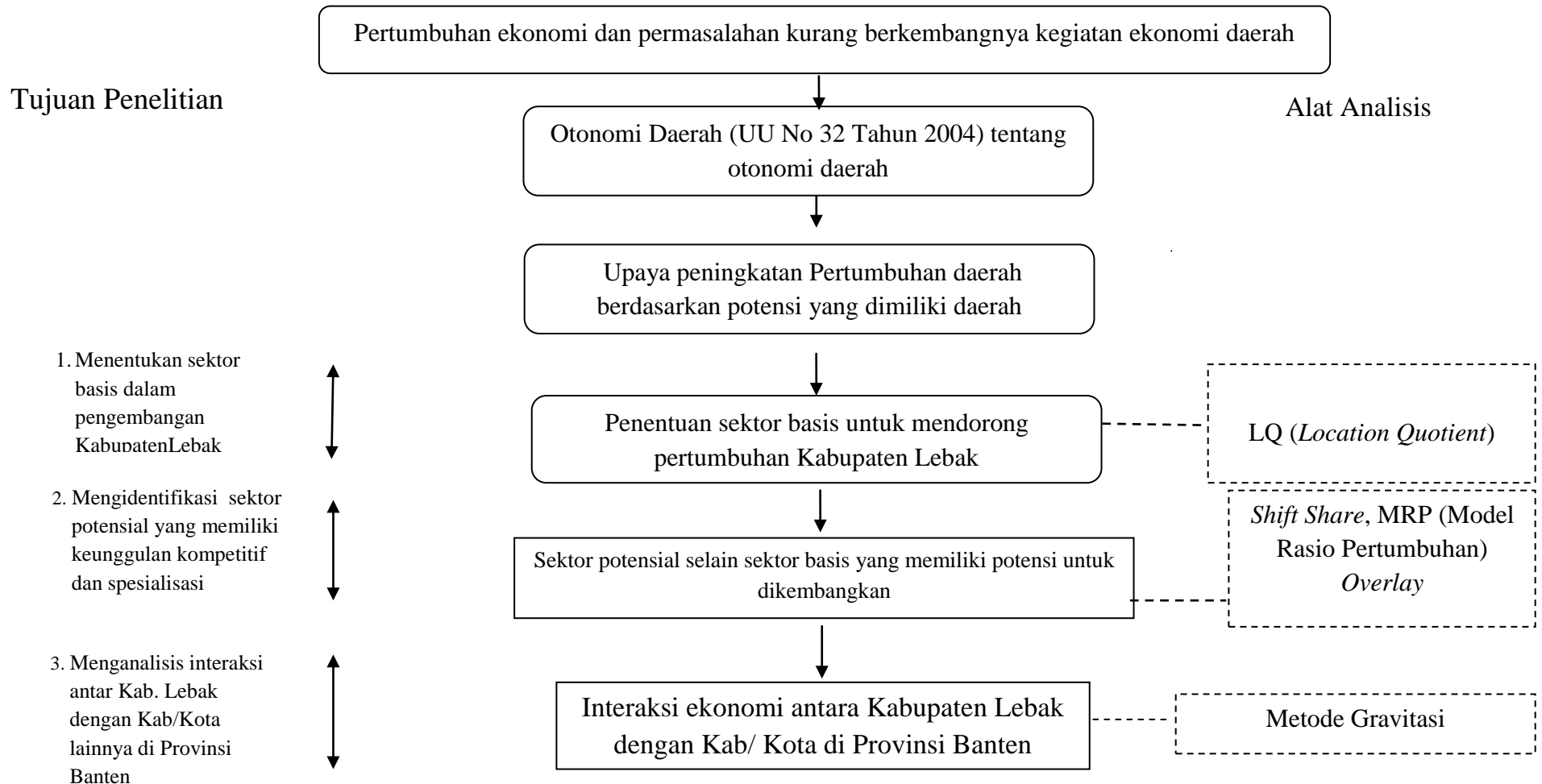
<b>NO</b>	<b>JUDUL/ PENULS/ TAHUN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>METODE</b>	<b>HASIL</b>
				<p>dikembangkan sebagai mitra kerjasama dalam pengembangan wilayah. Hasil analisis Overlay dan Shift Share adalah Berdasarkan analisis Overlay dan Shift Share menunjukkan penetapan Kota Magelang sebagai pusat pertumbuhan tepat karena memiliki banyak sektor potensial yaitulistrik; sektor bangunan; sektor pengangkutan; sektor perdagangan; sektor keuangan; dan sektor jasa. Dari keenam sektor potensial yang menjadi prioritas pertama untuk pengembangan Kota Magelang adalah sektor pengangkutan, kedua adalah sektor listrik, sektor perdagangan, sektor keuangan dan ketiga adalah sektor jasa.</p>

### **2.1.8. Kerangka Pemikiran**

Salah satu upaya pemerintah pusat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yaitu melalui otonomi daerah. Otonomi daerah tersebut tercantum dalam UU NO 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa pemberian hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya.

Hal tersebut menjadi suatu landasan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya menjadi lebih maju. Pada dasarnya kemajuan suatu daerah tidak hanya tergantung pada potensi yang dimiliki saja melainkan adanya hubungan dengan daerah lain. Jarak yang dekat dengan pusat pertumbuhan menjadi salah satu faktor penentu tingkat kemajuan suatu daerah. Begitupun halnya yang terjadi pada Kabupaten Lebak. Jarak yang cukup dekat dengan daerah lainnya bahkan Ibu Kota Negara yaitu Jakarta, namun selama ini belum menunjukkan dampak yang cukup baik bagi perekonomian Kabupaten Lebak itu sendiri. Walaupun kemudahan akses sudah tersedia seperti adanya transportasi kereta api yang menghubungkan Kabupaten Lebak dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, kerangka pemikiran berikut ini akan menjelaskan bagaimana rentetan dari penelitian yang akan dilakukan terkait permasalahan yang telah disebutkan.

**Gambar 2.2**  
**Alur Pikir Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional**

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Produk Domestik Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan – kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut (Kuncoro, 2013). Penelitian ini menggunakan PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan tahun 2000 Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten pada tahun 2000-2012. Satuan dari PDRB yang digunakan yaitu dalam juta rupiah.

##### **2. Penduduk**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (Statistik Indonesia). Penelitian ini menggunakan data jumlah penduduk kabupaten/ kota di Provinsi Banten serta jumlah penduduk Provinsi Banten pada tahun 2000 – 2012. Satuan dari variabel penduduk ini yaitu orang/ jiwa.

##### **3. Jarak**

Jarak merupakan panjang garis antara titik A dengan titik B (Pratomo, 2004).

Penelitian ini menggunakan data jarak antara Kabupaten Lebak dengan Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dengan Kota Serang, Kabupaten Lebak dengan Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak dengan Kota Tangerang Selatan. Satuan dari variabel jarak yaitu km.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.2.1. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data *time series* dengan periode pengamatan 2000 -2012 (12 tahun). Data yang digunakan antara lain:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 Provinsi Banten serta Kabupaten/ Kota yang ada di provinsi tersebut. Data ini digunakan untuk mendukung alat analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan *Overlay*.
2. Jumlah penduduk Provinsi Banten serta jumlah penduduk Kabupaten/ Kota yang ada di provinsi tersebut. Data ini digunakan untuk mendukung alat analisis model gravitasi.
3. Jarak antara Kabupaten Lebak dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Banten. Data ini juga untuk mendukung perhitungan model gravitasi.
4. Data geografis Kabupaten Lebak dan data - data lainnya yang mendukung.

### **3.2.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan telah diproses oleh pihak-pihak lain sebagai hasil atas penelitian yang telah dilaksanakan. Sumber data tersebut antara lain:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak
3. *Global Positioning System (GPS)*

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Contohnya seperti buku-buku terbitan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Pusat Statistik (BPS), perpustakaan dan *download* dari internet berupa artikel, jurnal dan buku-buku lainnya.

### **3.4. Metode Analisis**

Terdapat beberapa metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Guna mencapai tujuan pertama yaitu mengidentifikasi sektor basis dalam pengembangan

Kabupaten Lebak digunakan metode analisis Indeks LQ (*Location Quotient*) dan *Shift Share* (SS). Kedua, mengidentifikasi sektor potensial yang memiliki keunggulan kompetitif dan spesialisasi menggunakan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan *overlay*. Ketiga, menganalisis interaksi ekonomi Kabupaten Lebak dengan Kabupaten/ Kota disekitarnya di Provinsi Banten dengan menggunakan Model Gravitasi.

### 3.4.1. Analisis Location Quotient (LQ)

Alat analisis *Location Quotient* (LQ) membandingkan besarnya peranan sektor (Kabupaten Lebak) terhadap besarnya peranan sektor tersebut pada wilayah referensi (Provinsi Banten). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{si / S}{ni / N} \quad (3.1)$$

Keterangan:

*LQ*: Indeks *Location Quotient*

*si*: PDRB Sektor i Kabupaten Lebak dalam juta rupiah

*S*: PDRB total Kabupaten Lebak dalam juta rupiah

*ni*: PDRB sektor i di Provinsi Banten dalam juta rupiah

*N*: PDRB total Provinsi Banten

Kriteria pengukuran LQ (Arsyad, 2002) yaitu:

- a.  $LQ < 1$  artinya sektor i di Kabupaten Lebak lebih kecil dari sektor yang sama di Provinsi Banten. Sektor tersebut bukan sektor basis dan kurang potensial

untuk dikembangkan. Bahkan sektor tersebut berperan untuk kebutuhan konsumsi hanya diwilayah studi saja.

- b.  $LQ = 1$  artinya peranan relatif sektor  $i$  di Kabupaten Lebaksama dengan peran relatif sektor  $i$  di Provinsi Banten.
- c.  $LQ > 1$  artinya tingkat spesialisasi sektor  $i$  di Kabupaten Lebak lebih besar dari sektor yang sama di Provinsi Banten. Selain itu, dapat pula diartikan bahwa Kabupaten Lebak dapat mengekspor hasil output sektor  $i$  keluar daerah. Sektor tersebutlah yang merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan.

Nilai  $LQ$  yang didapat merupakan indeks  $LQ$  selama setahun. Namun, penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2000-2012. Oleh karena itu, untuk mendapatkan indeks  $LQ$  selama 12 tahun maka perlu dibuat rata-rata dari nilai  $LQ$  tahun 2000-2012 tersebut. Cara menghitung rata-rata sebagai berikut (Mason dan Lind, 2006):

$$\bar{X}LQ = \frac{\sum LQ}{n} \quad (3.2)$$

Keterangan:

$\bar{X}LQ$ : Rata-rata hitung indeks  $LQ$

$LQ$ : Indeks  $LQ$

$n$ : Jumlah Data

Apabila selama periode penelitian sektor  $i$  selalu menjadi sektor basis, maka sektor tersebut merupakan sektor penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

### 3.4.2. Analisis *Shift Share* (SS)

Analisis *Shift Share* juga digunakan untuk membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor di daerah studi dengan daerah referensi. Perbedaannya analisis *Shift Share* dengan *Location Quotient* adalah metode *Shift Share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Tujuan analisis ini adalah untuk menunjukkan sektor yang berkembang disuatu wilayah studi jika dibandingkan dengan perekonomian daerah wilayah referensi. Selain itu, analisis ini digunakan pula untuk melihat pertumbuhan PDRB dari sektor-sektor yang dimiliki baik dari pengaruh internal (faktor lokasional) maupun pengaruh eksternal (struktur industri) (Arsyad, 2002).

Komponen *Shift* adalah penyimpangan (*deviation*) dari *share* wilayah referensi dalam pertumbuhan sektor *i*. Penyimpangan ini positif di daerah-daerah yang tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah-daerah yang tumbuh lebih lambat atau merosot dibandingkan dengan pertumbuhan sektor di wilayah referensi.

Bagi setiap daerah, *Shift* atau penyimpangan dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu *proportional shift component* (P) dan *differential shift component* (D). *Proportional shift component* (P) ini mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh kemampuan sektor-sektor industri di Kabupaten Lebak. Komponen ini positif ( + ) di Kabupaten Lebak yang berspesialisasi dalam sektor *i* yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor *i* di Provinsi Banten dan negatif ( - ) di daerah yang berspesialisasi dalam sektor *i* yang tumbuh lebih lambat atau

bahkan sedang merosot dibandingkan dengan sektor i di Provinsi Banten. *Differential shift component* (D) mengukur besarnya *shift regional netto* yang diakibatkan oleh faktor –faktor lokasional internal. Jadi, suatu daerah mempunyai keunggulan lokasional seperti sumber daya yang melimpah akan mempunyai *differential shift component* (D) yang positif, sedangkan daerah secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai komponen yang negatif.

Rumus *Shift Share* (Tarigan, 2005) adalah:

$$\Delta E_r = E_{r,t} - E_{r,t-n} \quad (3.3)$$

Artinya pertambahan sektor i adalah banyaknya jumlah output sektor i pada tahun akhir dikurangi output pada sektor i pada tahun awal. Persamaan diatas berlaku untuk total output pada sektor i di wilayah studi . Hal ini dapat juga dilihat persektor sebagai berikut:

$$\Delta E_{r,i,t} = (NS_i + P_{r,i} + D_{r,i}) \quad (3.4)$$

$$NS_{i,t} = E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n} \quad (3.5)$$

$$P_{r,i,t} = \left( \frac{\Delta EN_{i,t}}{EN_{i,t-n}} - \frac{\Delta EN_t}{EN_{t-n}} \right) E_{r,i,t-n} \quad (3.6)$$

$$D_{r,i,t} = \left( \frac{\Delta E_{r,i,t}}{E_{r,i,t-n}} - \frac{\Delta EN_{i,t}}{EN_{i,t-n}} \right) x E_{r,i,t-n} \quad (3.7)$$

Keterangan :

$\Delta$  : Perubahan tahun akhir dikurangi dengan tahun awal

$EN$  : Total PDRB Provinsi Banten

- $E_r$  : Total PDRB Kabupaten Lebak  
 $i$  : Sektor tertentu  
 $t$  : Tahun  
 $t-n$  : Tahun Awal  
 $NS_i$  : *National Share* (Juta Rupiah)  
 $P_{r,i}$  : *Proportional Shift* (Juta Rupiah)  
 $D_{r,i}$  : *Differential Shift* (Juta Rupiah)

Pengukuran dari analisis *Shift Share* (Tarigan, 2005) sebagai berikut:

- a.  $NS_i$  bernilai positif menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor  $i$  di Kabupaten Lebak lebih cepat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Banten. Apabila  $NS_i$  bernilai negatif menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor  $i$  di Kabupaten Lebak lebih lambat dibanding dengan pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Banten.
- b.  $P_{r,i}$  menunjukkan komponen *proportional shift* yang dipakai untuk menghasilkan besarnya *shift netto* bila terjadi perubahan PDRB pada sektor  $i$ . Komponen ini positif di daerah yang berspesialisasi pada sektor tertentu di Provinsi Banten tumbuh lebih cepat dan negatif bila daerah berspesialisasi pada sektor  $i$  dan pertumbuhannya lebih lambat.
- c.  $D_{r,i}$  menunjukkan *differential shift* yang dipakai untuk mengukur besarnya *shift netto* yang diakibatkan sektor tertentu yang lebih cepat atau lambat pertumbuhannya di wilayah studi (Kabupaten Lebak) karena faktor lokasional



seperti melimpahnya sumber daya dan mengukur keunggulan kompetitif sektor di daerah tersebut.  $D_{r,i}$  bernilai positif pada sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan  $D_{r,i}$  bernilai negatif pada sektor yang tidak memiliki keunggulan kompetitif.

### 3.4.3. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis *Location Quotient* (LQ) dan analisis *Shift Share* merupakan alat analisis yang memiliki konsep berbeda. Analisis *Location Quotient* (LQ) konsepnya yaitu kontribusi sedangkan analisis *Shift Share* konsepnya yaitu pertumbuhan yang mengarah pada tingkat spesialisasi dan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu diperlukan satuan dan pola yang sama agar dapat menghasilkan sektor yang memang potensial berdasarkan kontribusi dan pertumbuhannya. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan alat analisis yang dihasilkan dari memodifikasi analisis *Shift Share*. Guna diperlukan satuan dan bahasa yang sama untuk mendapatkan hasil yang dapat mencerminkan sektor potensial dari suatu daerah maka analisis model rasio pertumbuhan ini berguna untuk mencapai tujuan tersebut. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yaitu perbandingan pertumbuhan berdasarkan pada kriteria PDRB suatu kegiatan sektoral baik dalam lingkup yang lebih luas (Provinsi Banten) maupun di Kabupaten Lebak. Pendekatan MRP ini juga dibagi menjadi dua (Yusuf, 1999) yaitu:

1. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)

Rasio pertumbuhan wilayah referensi yaitu membandingkan pertumbuhan PDRB masing-masing sektor di Provinsi Banten dengan PDRB Kabupaten Lebak. Formula Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) yaitu:

$$RPr = \frac{\Delta E_{N,i,t} / E_{N,i,t}}{\Delta E_{N,t} / E_{N,t-n}} \quad 3.2$$

Keterangan :

$RPr$  : Rasio pertumbuhan wilayah referensi (Provinsi Banten)

$\Delta$  : Perubahan, tahun akhir dikurangi dengan tahun awal (tahun t-n)

$E_{N,i}$  : PDRB sektor i di Provinsi Banten

$E_N$  : PDRB Total di provinsi Banten

$t$  : tahun

$t-n$  : tahun awal

Jika  $RPr$  sektor tertentu lebih besar dari RPs maka  $RPr$  dikatakan (+) yang berarti pertumbuhan suatu sektor tertentu di Provinsi Banten lebih tinggi dari pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten Lebak. Selain itu, jika  $RPr$  lebih kecil dari RPs maka RPr dikatakan (-) yang berarti bahwa pertumbuhan suatu sektor tertentu di Provinsi Banten lebih rendah dari pertumbuhan sektor yang sama di Kabupaten Lebak.

## 2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)

Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) memiliki perbedaan dengan RPr. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi yaitu membandingkan pertumbuhan masing-masing sektor khusus di wilayah studi (Kabupaten Lebak) dengan pertumbuhan sektoral di Provinsi Banten. Rumus RPs adalah:

$$RPs = \frac{\Delta Er,i,t / \Delta Er,i,t-n}{\Delta EN,i,t / \Delta EN,i,t-n} \quad (3.9)$$

Keterangan:

$RPs$  = Rasio pertumbuhan wilayah studi (Kabupaten Lebak)

$\Delta$  = Perubahan, tahun akhir dikurangi dengan tahun awal

$Er, i$  = PDRB sektor  $i$  di Kabupaten Lebak

$EN, i$  = PDRB sektor  $i$  di Provinsi Banten

$t$  = Tahun

$t - n$  = Tahun Awal

Jika  $RPs$  lebih besar dari 1 maka  $RPs$  dikatakan positif (+) yang berarti pertumbuhan sektor tertentu tertentu di Kabupaten Lebak lebih tinggi dari pertumbuhan sektor produksi tertentu Provinsi Banten dan jika  $RPs$  lebih kecil dari 1 dikatakan negatif (-) yang berarti bahwa pertumbuhan suatu sektor produksi tertentu ditingkat Kabupaten Lebak lebih rendah dari pada pertumbuhan sektor  $i$  Provinsi

Banten. Menurut Yusuf (1999) bahwa analisis MRP akan diperoleh nilai riil dan nilai nominal kemudian hasil kombinasi keduanya dapat diperoleh deskripsi sektor ekonomi yang potensial di Kabupaten Lebak yang dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu:

- c. Klasifikasi 1, yaitu nilai  $RPr$  (+) dan  $RPs$  (+) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik ditingkat provinsi Banten maupun tingkat kabupaten Lebak. Sektor ini disebut sebagai dominan pertumbuhan.
- d. Klasifikasi 2, yaitu nilai  $RPr$  (+) dan  $RPs$  (-) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol ditingkat Provinsi Banten, namun belum menonjol di tingkat kabupaten Lebak.
- e. Klasifikasi ketiga, yaitu nilai  $RPr$  (-) dan  $RPs$  (+) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol ditingkat Provinsi Banten sementara pada tingkat Kabupaten Lebak termasuk menonjol.
- f. Klasifikasi keempat, yaitu nilai  $RPr$  (-) dan  $RPs$ (-) berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang rendah baik di tingkat kabupaten Lebak maupun di tingkat Provinsi Banten.

#### **3.4.4. Analisis Overlay**

Analisis *Overlay* digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan alat analisis yang paling baik, dimana hasil akhir dapat merupakan beberapa kemungkinan ataupun hanya merupakan hasil yang diinginkan saja. Pada penelitian ini, analisis *Overlay* merupakan rangkuman antara hasil dari analisis LQ

dengan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs).

Metode ini memberikan penilaian kepada sektor-sektor ekonomi dengan melihat nilai positif (+) dan negatif (-). Sektor yang jumlah nilai positif (+) paling banyak berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan begitu pula sebaliknya jika suatu sektor tidak mempunyai nilai positif berarti sektor tersebut bukan sektor unggulan. Notasi positif (+) berarti pertumbuhan sektor lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan sektor total di wilayah referensi. RPs bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor *i* lebih tinggi dibanding pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Banten. Sementara untuk LQ nilai positif diberikan pada sektor ekonomi yang nilai Indeks *Location Quotion* lebih dari 1 ( $LQ > 1$ ). Terdapat tiga kriteria dalam analisis *Overlay* yaitu:

- a. RPr, RPs dan LQ ketiganya bernilai positif (+), berarti sektor tersebut mempunyai potensi daya saing yang kompetitif maupun lebih unggul dibanding kegiatan yang sama di tingkat Provinsi Banten.
- b. RPr bernilai negatif (-) sedangkan RPs dan LQ positif (+), berarti sektor tersebut merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Lebak.
- c. RPr, RPs dan LQ ketiganya bernilai negatif (-), berarti sektor tersebut kurang memiliki daya saing dan pertumbuhannya cenderung sangat lambat dibandingkan dengan kegiatan yang sama di Provinsi Banten.

### 3.4.5. Model Gravitasi

Dalam analisis spasial, model gravitasi ini sering di gunakan untuk menentukan sebuah lokasi. Baik itu lokasi untuk tujuan aglomerasi industri, pusat perdaganga, pusat kota dan lain – lain. Namun, dalam penelitian ini model gravitasi digunakan untuk melihat besarnya daya tarik potensi Kabupaten Lebak melalui kuatnya interaksi ekonomi antara kabupaten tersebut dengan kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Banten. Kuat atau lemahnya nya hasil analisis gravitasi tersebut dapat membantu pemerintah dalam penentuan perencanaan kebijakan perekonomian dalam hal kerjasama dengan kabupaten/ kota di Provinsi Banten. Rumus untuk menghitung interaksi antar daerah tersebut menurut Tarigan (2005) sebagai berikut:

$$I_{A.B} = k \cdot \frac{P_A \cdot P_B}{(D_{A.B})^2} \quad (3. 10)$$

Keterangan:

$I_{A.B}$  = Kekuatan interaksi antar wilayah A dan B

$k$  = Angka konstanta empiris nilainya 1

$P_A$  = Jumlah penduduk wilayah A

$P_B$  = Jumlah penduduk wilayah B

$D_{A.B}$  = Jarak wilayah A dan wilayah B

Nilai  $I_{A.B}$  menunjukkan eratnya hubungan antar wilayah A dan wilayah B. Semakin tinggi nilai  $I_{A.B}$  makasemakin erat hubungannya antara dua wilayah tersebut.

Dengan demikian semakin banyak pula perjalanan kegiatan ekonomi atau arus barang dan jasa antar wilayah tersebut sebagai konsekuensi interaksi antar daerah dalam satu kawasan. Nilai  $I_{A,B}$  yang didapat merupakan indeks gravitasi selama setahun. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan tahun 2000-2012 untuk mendapatkan indeks selama 12 tahun maka nilai  $I_{A,B}$  tahun 2000-2012 dibuat rata-rata. Cara menghitung rata-rata (Mason dan Lind, 2006) sebagai berikut:

$$\bar{X}_{12} = \sum \frac{I_{12}}{n} \quad (3. 11)$$

Keterangan:

$\bar{X}_{12}$  : Rata-rata hitung indeks gravitasi

$I_{12}$  : Interaksi dalam wilayah 1 dan 2

$n$  : Jumlah data